

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki fungsi dan peranan yang sangat strategis. Selain memberikan pendapatan bagi masyarakat, usaha mikro kecil juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha kecil menengah itu sendiri. Ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat akan menjadi masalah yang cukup pelik di masa mendatang. Jutaan angkatan kerja yang terdidik maupun yang tidak terdidik, akan membutuhkan lapangan usaha dan pekerjaan dengan segera dan serentak. Telah terbukti selama ini bahwa usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu alternatif untuk membantu memecahkan masalah tersebut, mampu menampung tenaga kerja yang cukup banyak jumlahnya, baik di pedesaan maupun di perkotaan.

UMKM telah memberikan kontribusi yang penting dan besar dalam menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat Indonesia. Karena itu pemberdayaan dan pengembangan yang berkelanjutan perlu dilakukan terhadapnya agar UMKM tidak hanya tumbuh dalam jumlah, tetapi juga berkembang dalam kualitas dan daya saing produknya. Pemberdayaan UMKM menjadi sangat strategis, karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Perkembangan sektor UMKM yang demikian menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar jika hal ini dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik

tentu dapat mewujudkan usaha mikro kecil dan menengah yang tangguh. Sementara itu di sisi lain UMKM juga dihadapkan pada masalah yang terletak pada proses administrasi. Pemerintah sudah mencoba membantu mengatasi kendala yang sebagian besar oleh pelaku usaha mikro kecil menengah, seperti memberikan kredit bagi pelaku usaha. Namun muncul permasalahan yang baru, para pelaku UMKM diharuskan menyertakan laporan keuangan sebagai syarat mengajukan pinjaman kepada pihak bank. Karena dari pihak bank sendiri tidak ingin mengambil resiko dalam penyaluran kredit bagi UMKM lantaran perbankan tidak mengetahui perkembangan usaha tersebut. Sementara kebanyakan UMKM yang ada di Indonesia tidak memiliki laporan keuangan dengan penerapan akuntansi pada UMKM yang masih sangat terbatas.

Beberapa hasil penelitian (Pinasti, Haryanto, Idrus, Marbun : 2007) menunjukkan bahwa kelemahan usaha kecil di Indonesia adalah pada umumnya pengelola usaha kecil tidak menguasai dan tidak menerapkan sistem keuangan yang memadai. Usaha kecil kebanyakan belum memiliki dan menerapkan catatan akuntansi dengan ketat dan disiplin dengan pembukuan yang sistematis dan teratur. Pengusaha kecil secara umum menganggap bahwa informasi akuntansi tersebut tidak penting, selain sulit diterapkan bagi pelaku pengusaha UMKM juga membuang waktu dan biaya. Hal terpenting bagi para pelaku usaha kecil adalah bagaimana cara menghasilkan laba yang banyak tanpa repot menerapkan akuntansi.

Dalam menjalankan aktivitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sering merasa kesulitan dalam melakukan pencatatan terhadap apa yang terjadi pada operasional usahanya. Apalagi jika harus dilakukan pengukuran dan penilaian atas aktivitas yang terjadi dalam usahanya. Pencatatan hanya dilakukan dengan menghitung antara selisih uang masuk dan uang keluar, tanpa melihat pengeluaran uang tersebut digunakan untuk kegiatan usahanya atau

bukan. Kebanyakan para pelaku usaha hanya mencatat jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan ataupun jumlah barang yang dijual. Namun pencatatan ini hanya sebatas pengingat saja dan tidak dengan format yang diinginkan oleh perbankan. Meskipun tidak dapat di pungkiri mereka dapat mengetahui jumlah modal akhir mereka setiap tahunnya yang hampir sama jumlahnya jika kita mencatat dengan sistem akuntansi.

Penyusunan laporan keuangan yang merupakan tahapan awal dari penerapan akuntansi akan menghasilkan informasi yang mempunyai peranan penting , baik untuk menyusun perencanaan keuangan, pengendalian , maupun untuk pengambilan keputusan keuangan. Berbagai penelitian telah menyimpulkan bahwa penggunaan informasi akuntansi dalam menjalankan operasionalnya akan mempengaruhi kesuksesan dari usaha menengah tersebut. Laporan keuangan menjadi salah satu komponen yang mutlak harus dimiliki oleh UMKM jika mereka ingin mengembangkan usaha dengan mengajukan kredit modal usaha kepada para kreditur yang dalam hal ini adalah pihak perbankan. Untuk itu, kebiasaan untuk mencatat setiap kegiatan usaha yang terjadi dan menyusun laporan keuangan harus di tumbuhkan kepada para pelaku UMKM.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tanggal 12 Juli 2009 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2011. Kehadiran Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau lebih dikenal dengan SAK ETAP diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk UMKM dalam menyajikan laporan keuangan. SAK ETAP juga di harapkan menjadi solusi permasalahan internal perusahaan, terutama bagi manajemen yang hanya melihat hasil laba yang diperoleh tanpa melihat kondisi keuangan yang sebenarnya.

Di terbitkannya SAK ETAP bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi entitas skala kecil dan menengah. SAK yang berbasis IFRS ditujukan bagi entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dan entitas yang banyak melakukan lintas negara. SAK umum tersebut rumit untuk dipahami serta diterapkan bagi sebagian besar entitas usaha skala kecil dan menengah di Indonesia. Beberapa hal, SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK Umum dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Pada umumnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah entitas tanpa akuntabilitas publik, oleh karena itu pengguna SAK ETAP banyak terdiri dari entitas dengan kategori usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) termasuk dalam ETAP, karena tidak memiliki akuntabilitas yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan tidak untuk tujuan umum entitas yang tidak memiliki akuntabilitas.

Banyak hambatan yang menyebabkan UMKM kurang berkembang seperti permodalan, kualitas sumber daya manusia, persaingan usaha yang ketat, pemasaran produk, kurang keahlian dalam manajemen pengelolaan keuangan dan akuntansi. Pengelolaan keuangan dan akuntansi menjadi masalah utama UMKM. Hal ini sering diabaikan oleh pemilik UMKM, khususnya berkaitan dengan penerapan kaidah akuntansi yang benar. Selain itu, penegelolaan keuangan pada UMKM merupakan salah satu masalah untuk kemajuan UMKM. Pengelolaan keuangan ini biasanya diremehkan dan dianggap mudah, padahal dalam kenyataannya pengelolaan keuangan UMKM membutuhkan ketrampilan akuntansi yang baik oleh pemiliknya. Karena itu UMKM harus mempunyai catatan untuk usahanya karena pencatatan tersebut dapat digunakan pemilik untuk menilai perkembangan usahanya. Untuk menilai kinerja keuangan usaha yang dijalankan maka pemilik dapat melihatnya di

laporan keuangan perusahaan, selain itu laporan keuangan dapat digunakan untuk menyusun strategi usaha kedepannya.

UMKM Batik Latansa Bojonegoro adalah UMKM yang bergerak di bidang industri pembuatan kain batik di Kota Bojonegoro, Jawa Timur. UMKM ini berdiri sejak tahun 2009, sejak berdirinya UMKM, pemilik UMKM jarang memperhatikan sistem akuntansi yang lazim, dimana proses pencatatan biaya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Pencatatan biaya yang dibutuhkan pada saat pembuatan batik seringkali diabaikan, sehingga biaya – biaya tersebut sebenarnya telah dikeluarkan tidak terhitung dan tidak tercatat pada laporan. Hal tersebut menyebabkan manajemen pada UMKM Batik Latansa Bojonegoro tidak akurat dalam membuat laporan keuangan secara tepat yang sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, Manajemen UMKM dapat menetapkan harga jauh lebih mudah dan yakin bahwa manajemen UMKM memiliki informasi yang pasti mengenai biaya pekerja atau unit yang akan dijual.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menentukan judul sebagai berikut **“Penerapan Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis Sak Etap Pada Umkm Batik Latansa Bojonegoro“**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah dalam penyusunan penelitian ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Standar Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada UMKM Batik LATANSA kota Bojonegoro.
2. Kendala apa yang dihadapi UMKM Batik Latansa Bojonegoro dalam menyusun laporan keuangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah pemilik UMKM Batik Latansa Bojonegoro menerapkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh UMKM Batik Latansa Bojonegoro dalam menyusun laporan keuangannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Aspek Akademis

Penelitian ini sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil topik yang sama dan menambah pembendaraan penelitian di STIE Mahardhika Surabaya.

2. Aspek Perkembangan Ilmu dan Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini akan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam mengambil keputusan oleh pemilik usaha khususnya dalam rangka memaksimalkan laba usaha, bahwa SAK ETAP dapat membantu proses pembuatan laporan keuangan secara benar dan sesuai dengan aturan yang telah berlaku di Indonesia.

3. Aspek Praktis

Penelitian ini berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan atas pentingnya penerapan pencatatan laporan keuangan berbasis SAK ETAP pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah.